Cateris Paribus Journal E-ISSN. 2775-6718

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM DI KOTA PAREPARE

The Role of Government in Addressing Extreme Poverty in Parepare City

Nuraziza[1], Bahruddin[2], Fajar Ladung[3]
Email: [1],fajarladung35@gmail.com[2,3]

[1] Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare[2]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare [3]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan Kode Pos 91131

Abstract

Nuraziza, 2025, with the thesis title "The Role of Government in Tackling Extreme Poverty in Parepare City". Supervisor 1: Bahruddin, SE., M.Si, Supervisor 2: Fajar Ladung, SE., M.Si. Thesis of Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Parepare (UMPAR).

Extreme poverty is a significant social issue that requires serious attention, both at the national and local levels. Parepare City is one of the regions that still faces considerable challenges in eradicating extreme poverty. The Parepare City Government plays a central role in accelerating the elimination of extreme poverty through well-planned and measurable policies and programs. This study aims to analyze the role of the Parepare City Government in formulating strategies, allocating budgets, and implementing effective programs to reduce extreme poverty. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including interviews, field observations, and documentation. The informants in this study consist of the Head of Division, Head of Economy, and staff at the Parepare City Bappeda Office, The results of this study indicate that the government has implemented various programs such as social assistance, educational subsidies, food aid, skills training, home improvement programs, and support for small businesses. However, the implementation of these programs still faces challenges such as limited budget allocations, unequal distribution of aid, and low community participation in the development planning process. The Parepare City Government needs to strengthen cross-sectoral coordination, improve the poverty data system, and promote more intensive community empowerment to ensure that the implemented programs run optimally and are well-targeted.

Keywords: Government Role, Extreme Poverty, Parepare City, Strategy, Social Policy.

ABSTRAK

Nuraziza, 2025, dengan judul penelitian "Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Parepare". Pembimbing 1: Bahruddin, SE., M.Si, Pembimbing 2: Fajar Ladung, SE., M.Si. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR).

Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kota Parepare menjadi salah satu daerah yang masih menghadapi tantangan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kota Parepare memegang peran sentral dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai kebijakan dan program yang terencana dan terukur, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah Kota Parepare dalam

merancang strategi, mengalokasikan anggaran, dan melaksanakan program-program yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Ekonomi, dan Staf di Kantor Bappeda Kota Parepare, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan berbagai program seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, bantuan pangan, pelatihan keterampilan kerja, perbaikan rumah tidak layak huni, dan penguatan sektor usaha kecil. Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan anggaran, distribusi bantuan yang belum merata, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Parepare perlu meningkatkan sinergi lintas sektor, memperbaiki basis data kemiskinan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara lebih intensif agar program-program yang dilaksanakan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Kemiskinan Ekstrem, Kota Parepare, Strategi, Kebijakan Sosial.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar memiliki keanekaragaman hayati dan sumber daya alam (SDA) yang potensial bagi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) dengan share Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 sebesar 35,3 persen (ASEAN Secretariat, 2021). Perekonomian yang kuat disertai permintaan domestik yang baik membuka peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan (Bank Pembangunan Asia, tahun 2019.).

Pada Juli 2021, Bank Dunia mengategorikan Indonesia kembali dalam negara Berpendapatan menengah ke bawah setelah sebelumnya termasuk dalam kategori Berpendapatan menengah ke atas. Hal ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia sejak Maret 2020. Pandemi secara umum bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja tetapi juga pemicu awal terjadinya krisis ekonomi di negara-negara yang terdampak (Prawoto et al., 2020). Selain itu, pandemi Covid-19 tampaknya berdampak pada seseorang secara tidak proporsional di berbagai kelompok sosial ekonomi dan bervariasi menurut etnis, pendapatan, usia, jenis kelamin, dan kelompok atau komunitas sosial (Siddique et al., 2022).

Implikasi Covid-19 terhadap ekonomi diawali sebagai guncangan negatif pada penawaran (Guncangan penawaran negatif) yang menyebabkan dua hal yaitu banyak tenaga kerja yang terinfeksi sebagai penggerak kegiatan ekonomi dan pembatasan menekan kegiatan ekonomi yang berjalan (Suryahadi et al., 2020).

Ekonomi Indonesia pada tahun 2020 tercatat mengalami penurunan sebesar 2,19 persen. (y-on-y) (BPS, 2021). Konsumsi rumah tangga sebagai komponen pengeluaran terbesar mengalami kontraksi sebesar 2,63 persen. Pandemi telah menyebabkan krisis yang mengurangi tingkat kesejahteraan, sehingga diperkirakan rata-rata kesejahteraan global stagnan atau bahkan menurun antara 2019-2020 akibat penurunan pertumbuhan pendapatan (World Bank, 2021). Baker et al. (2020) mengungkapkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami penurunan, terutama selama periode pembatasan sosial, terutama di sektor pariwisata, hiburan, dan layanan akomodasi makan dan minum. Kemiskinan dan kekurangan merupakan satu kesatuan yang selalu menempel didalam bayangan seseorang, dan kemiskinan dapat dikatakan sebagai masalah sosial universal. Perasaan miskin dirasakan ketika selalu merasa iri dengan kehidupan orang lain yang memiliki penghasilan tinggi. Kemiskinan menjadi suatu permasalah utama yang selalu terjadi bagi banyak negara di dunia, terutama negara berkembang.

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan banyak masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga memperburuk pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024, diperlukan sinergi antar program dan kerja sama kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Instruksi ini menekankan pentingnya kolaborasi karena kemiskinan ekstrem adalah masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.

Kemiskinan menjadi masalah sosial yang selalu dikaji dan masih banyak terjadi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi pendapatan yang tidak terjamin, kebutuhan dasar yang rendah, keterbatasan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang layak. Menurut Sungkuwo Edy Mulyono (2017), kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk karakter dan pola hidup masyarakat miskin. Selain itu, kemiskinan memicu masalah sosial lain seperti k pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, masalah kesehatan, dan kriminalitas.

Robert Lawang (2012) menyebut kemiskinan ekstrem sebagai kondisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan, dengan pendapatan di bawah US$1,91 PPP per kapita per hari atau sekitar Rp9.089 per hari.

Data menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem di Indonesia menurun setiap tahun: pada 2021 sebanyak 26,50 juta jiwa, turun menjadi 20,01 juta jiwa pada 2022, dan pada 2023 menjadi 18,19 juta jiwa. Meskipun terus menurun, kemiskinan ekstrem tetap perlu menjadi perhatian bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, Kota Parepare memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Penelitian ini difokuskan pada kantor BAPPEDA Kota Parepare untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kemiskinan ekstrem, serta peran yang akan dimainkan oleh BAPPEDA dalam penanggulangan masalah ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Parepare""**

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, serta persepsi. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti berfokus pada pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai objek yang diteliti serta memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang terkait dengan penelitian

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan lokasi penelitian di kota parepare sulawesi selatan , Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) karena instansi ini memiliki tugas dan kewenangan dalam menangani masalah kemiskinan di daerah kota parepare.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki informasi atau data yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Informan bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja oleh peneliti. Adapun jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 4 orang,

D. Definisi operasional variabel

1. Kemiskinan Ekstrem

   Keadaan di Individu atau rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dengan layak., termasuk makanan, tempat tinggal, dan akses terhadap layanan kesehatan.

   Indikator: Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan ekstrem. Jumlah rumah tangga yang menerima bantuan sosial. Satuan: Persen (%), jumlah rumah tangga.

2. Peran Pemerintah

   Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui program-program sosial dan ekonomi. Indikator: Jumlah program bantuan sosial yang dilaksanakan (misalnya Program Keluarga Harapan). Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Satuan: Jumlah program, persen (%).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada peneltian ini menggunakan 2 metode dalam teknik pengumpulan data yaitu :

1. Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seseorang peneliti melalui kontak langsung secara lisan atau tatap muka dengan sumber data, baik dalam situasi sebenarnya maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut. Wawancara dilakukan terhadap *key informant* (informan kunci), dengan menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara.
2. Dokumentasi. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Lexy J. Moleong, 2014). Adanya dokumentasi untuk mendukung data.

F. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif yang terdiri dari beberapa tahap, antara lain :

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu mengumpulkan data yang telah diperoleh dari lokasi penelitian, baik itu dalam bentuk wawancara maupun dokumen.\
2. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu menyederhanakan, merangkum dan memilih poin-poin penting sesuai dengan fokus data yang dibutuhkan.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu menyajikan data dalam bentuk deskriptif, narasi atau verbal.

4. *Data Verivication*(Verifikasi Data), yaitu memeriksa kembali data yang telah disajikan terkait benar salahnya data.
5. *Data Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan), yaitu menarik kesimpulan setelah data yang disajikan dinyatakan benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

A. Hasil Penelitian

1. Angka Kemiskinan

a. Data Penduduk Tahun 2019-2023

Jumlah penduduk Kota Parepare dalam kurun waktu Tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk KotaParepare Adapun Penyebaran penduduk Kota Parepare dari Tahun 2019-2023 terlihat pada tabel ini:

Tabel 1. Data Penduduk Tahun 2019-202

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Bacukiki	21.239	25.511	26.327	28.129	27.424
Bacukiki Barat	44.186	45.197	45.660	45.934	47.733
Ujung	33.463	33.843	33.863	33.758	36.479
Soreang	46.292	46.903	47.072	47.033	48.673
Jumlah	145.180	46.903	152.922	154.854	160.309

Sumber : BPS kota parepare tahun 2019-2023

b. Angka Kemiskinan Kota Parepare

Garis Kemiskinan merujuk pada tingkat pendapatan minimum yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar guna mencapai standar hidup yang layak di suatu negara.Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Garis Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2023 sebesar Rp. 445.032,-/Bulan/Kapita. Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp. 436.025,-/Bulan/Kapita, sedangkan Garis Kemiskinan Nasional tercatat sebesar Rp. 582.932,-/Bulan/Kapita.

Gambar 1. Angka Kemiskinan Kota Parepare



Sumber : data BPS Kota Parepare

Berdasarkan uraian gambar 1, bahwa ditahun 2019 persentase penduduk miskin Kota Parepare yaitu 5,26 persen, pada 2020 mengalami peningkatan mencapai 5,44 persen, pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan mencapai 5,40 persen dan ditahun 2022 kembali meningkat sebesar 5,41 persen, namun ditahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 5,34 persen.

Gambar 2. jumlah penduduk miskin Kota Parepare



Sumber : data BPS Kota Parepare

Berdasarkan uraian gambar 3.2, bahwa ditahun 2019 jumlah penduduk miskin Kota Parepare sebanyak 7.620 jiwa, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 7.960 jiwa dan ditahun 2021 menurun menjadi 7.930 jiwa, dan pada tahun 2022 naik menjadi 8.010 Jiwa serta ditahun 2023 terjadi penurunan lagi sebanyak 7.980 jiwa.

Gambar 3 *Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2019 – 2023*



Sumber : Data BPS Prov. Sulawesi Selatan

Mencermati Gambar 3.3, Pada tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Parepare 0,71 persen namun ditahun 2020 mengalami penigkatan yang signifikan sebesar 0,94 persen, ditahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,72 persen dan ditahun 2022 turun menjadi 0,56 persen, serta pada tahun 2023 terjadi peningkatan menjadi 0,58 persen.

Gambar 1 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan Kota Parepare Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data BPS Prov. Sulawesi Selatan

Mencermati Gambar 3.4, Pada tahun 2019 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Parepare sebesar 0,15 persen dan ditahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 0,24 persen, sedangkan ditahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen, dan ditahun 2022 turun menjadi 0,09 persen serta ditahun 2023 meningkat menjadi 0,12 persen.

2. Peran Pemeritah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Ekstremn Di Kota Parepare

Peran Pemerintah Kota Parepare dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sangat signifikan, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya. Upaya pemerintah diarahkan pada pengentasan kemiskinan melalui program-program strategis yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup langkah-langkah komprehensif untuk mengidentifikasi kelompok rentan dan memastikan mereka mendapatkan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, pemerintah berperan tidak hanya sebagai penyedia kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia.

salah satu strategi utama adalah penerapan program berbasis inklusi sosial. Pendekatan ini memastikan kelompok rentan dilibatkan secara aktif dalam berbagai program pemberdayaan. Kelompok rentan meliputi kaum miskin ekstrem, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga. Inklusi sosial menjadi upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial. Program ini juga meningkatkan kapasitas individu dan komunitas. Peningkatan kapasitas mendorong partisipasi dalam pembangunan. Langkah ini menciptakan efek domino yang positif dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Sosial Budaya Pemerintah Kota Parepare, peran pemerintah dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sangatlah signifikan. Beliau menyampaikan bahwa:

"Peran Pemerintah Kota Parepare sangat besar dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Parepare." Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi program-program berbasis inklusi sosial, pemberdayaan masyarakat, serta alokasi anggaran yang fokus pada kebutuhan kelompok rentan. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Pemerintah Kota Parepare berharap dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada dalam kategori miskin ekstrem.

Alokasi anggaran yang berfokus pada kebutuhan kelompok rentan menjadi pilar penting dalam strategi ini. Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan dana yang cukup untuk program-program yang secara langsung menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem. Contohnya adalah bantuan tunai langsung, pelatihan keterampilan kerja, dan subsidi kebutuhan dasar. Kebijakan anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

a. Pengelolaan Data Kemiskinan Ekstrim

Pemerintah Kota Parepare sangat memahami bahwa keberhasilan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem harus dimulai dari ketersediaan data yang valid. Olehnya itu, Pemerintah Kota Parepare telah melakukan verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diperoleh dari Kemenko PMK dan telah dipadupadankan dengan Data Hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Bappenas. Ketersediaan data yang valid akan menghasilkan intervensi program yang tepat sasaran.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sekitar 7.980 jiwa, yang setara dengan 5,34% dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan Maret 2022, di mana jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 8.010 jiwa atau 5,41% dari total penduduk. Namun, laporan lain menyebutkan bahwa pada November 2024, persentase penduduk miskin di Kota Parepare turun menjadi 5,27%. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin tetap berada di kisaran 8.010 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk miskin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk inflasi pangan yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kota Parepare telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti Lazismu, untuk meluncurkan program-program yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan di kota tersebut.

Selain itu, data dari BPS melaporkan bahwa selama 10 tahun terakhir, persentase penduduk miskin di Kota Parepare mengalami tren penurunan, dari 6,08% menjadi 5,27%. Meskipun demikian, tantangan dalam pengentasan kemiskinan masih ada, terutama terkait dengan faktor-faktor ekonomi seperti inflasi dan daya beli masyarakat.

Pemerintah Kota Parepare terus berupaya melalui berbagai program dan kebijakan Untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan, berikut adalah data persentase penduduk miskin di Kota Parepare dari tahun 2019 hingga. 2024:

Tabel 5. 1 Persentase Penduduk Miskin 2019-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2019	5,26%
2020	5,34%
2021	5,41%
2022	5,34%
2023	5,34%
2024	5,27%

Sumber : BPS kota parepare tahun 2019-2024

Data ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kota Parepare mengalami fluktuasi selama periode tersebut, dengan tren penurunan yang konsisten sejak tahun 2021.

Perlu dicatat bahwa data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dapat diakses melalui situs resmi BPS Kota Parepare. Pemerintah Kota Parepare terus berusaha mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program. dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. Perumusan Kebijakan

Perumusan Kebijakan yang tepat akan menentukan keberhasilan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kota Parepare telah merumuskan kebijakan yang berbasis data dalam penanganan kemiskinan ekstrem. Salah satu kebijakan yang dirumsukan adalah memastikan seluruh masyarakat miskin ekstrem telah memiliki Jaminan Kesehatan Gratis dan penyediaan fasilitas Pendidikan dan Kesehatan yang mudah diakses.

c. Pengalokasian Anggarana

Pemerintah Kota Parepare telah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memastikan seluruh intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat berjalan lancar.

Pada Tahun 2023 jumlah total anggaran dalam penanggulangan kemiskinan Kota Parepare sebesar Rp 92,088,607,908,- (Sembilanm Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) yang bersumber dari APBD maupun APBN. Anggaran tersebut terdiri dari program dan kegiatan yang berimplikasi langsung maupun tidak langsung ke penanggulangan kemiskinan.

Kesimpulan

Pemerintah Kota Parepare berkomitmen mengatasi kemiskinan ekstrem melalui pendekatan inklusi sosial, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi. Program difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, serta pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.

Langkah nyata yang dilakukan antara lain BPJS Kesehatan gratis, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan peralatan usaha, dan

perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah juga menekankan pentingnya validasi data dan penyaluran anggaran yang tepat sasaran untuk meningkatkan efektivitas program.

Tantangan seperti inflasi pangan direspons melalui kebijakan stabilisasi harga dan penguatan ketahanan pangan lokal. Dukungan dari lembaga zakat dan program nasional turut memperluas jangkauan bantuan. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Parepare tetap menjaga keberlanjutan program dengan pendekatan berbasis data dan kolaboratif. Strategi ini secara bertahap menunjukkan hasil positif dalam pengentasan kemiskinan ekstrem

SARAN

1. Pemerintah Kota Parepare menangani kemiskinan ekstrem melalui pendekatan inklusi sosial, yang melibatkan masyarakat secara aktif, serta kolaborasi lintas sektor dengan lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digunakan untuk validasi data yang akurat, memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif.
2. Fokus utama pemerintah meliputi pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta dukungan alat produksi. Program nasional seperti BPJS Kesehatan Gratis, PKH, KIP, dan BPNT, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin ekstrem.
3. Tantangan seperti inflasi pangan diatasi melalui kebijakan stabilisasi harga dan ketahanan pangan lokal. Pendekatan berbasis data serta kerjasama dengan lembaga zakat dan mitra lainnya memastikan program berkelanjutan dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arifianto, M. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berperan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 9*(1), 45–58.

Astuti, D. (2024). Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi Sulawesi Tengah: Pendekatan Konvergensi Dan Inovasi Program. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3(3), 355–363.

Bhan, S., & Jana, P. (2020). *Social Inclusion And Poverty Alleviation: Case Studies From Asia.* Cambridge University Press.

Dewi, S. P., & Aulia, R. (2017). Dampak Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Daerah Miskin. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial, 15*(2), 102–113.

Dwikartini, B. Y. P., Budiati, A., & Cadith, J. (2024). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Cilegon. *Jurnal Niara, 16*(3), 542–551.

Fiszbein, A., & Schady, N. R. (2009). Transfer Tunai Bersyarat: Mengurangi Kemiskinan Saat Ini Dan Masa Depan. Bank Dunia.Handayani, S., Pramudya, A. R., & Dwiastuti, W. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Pelatihan Kewirausahaan Di Masyarakat Miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat, 15*(2), 123–138.

Hidayati, M., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Togubang Dan Desa Tegar Priyah Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. *Respon Publik, 18*(1), 1–10.

Idris, F., Mukhrijal, M., & Rassanjani, S. (2023). Efektivitas Program Rumah Layak Huni Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 1,* 37–50.

Kabeer, N. (2015). The Politics Of Social Protection: A Critical Perspective. *Development And Change, 46*(5), 986–1005.

Kementerian Sosial. (2018). *Laporan Tahunan Program Perlindungan Sosial 2018.* Jakaa: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kementerian Sosial. (2020). *Peta Kemiskinan Ekstrem Di Indonesia.* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kusnadi, A., Suyanto, A., & Widyawati, I. (2020). Peran Bantuan Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Pada Kelompok Rentan. *Jurnal Kebijakan Publik, 12*(3), 215–228.

Pemerintah Kota Parepare. (2023). *Laporan Tahunan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem 2023.* Dinas Sosial Kota Parepare.

World Bank. (2018). Laporan Pembangunan Dunia 2018: Belajar Untuk Merealisasikan Janji Pendidikan. Kelompok Bank Dunia.

Desrinelti Desrinelti, M. A. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 83-84.

Lusya Vivi Gorahe, F. W. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Dalako Bembanehe Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. *EKSEKUTIF Jurnal Volume 1 No. 1 Tahun 2021*, 2.

Masloman, I. (2018). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA SEKTOR YANG POTENSIAL DAN BARDAYA SAING DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN . *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* , 48-49.

Noor, M. (2011). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I,*, 88.

Selvia Wulandari, R. S. (2022). PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN INFASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN (Studi Di Desa Tumbang Lahang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 152.

Selvia Wulandari, R. S. (2022). PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN INFASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN (Studi Di Desa Tumbang Lahang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 152-153.

Baharuddin, B. (2019). Produktivitas Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Balanca: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 35–55.

Ladung, F. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare. ECONOMOS: *Jurnal* Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), Artikel No. 573

Fitriani, F. (2018). Pengaruh Sektor Pariwisata, Sektor Industri, Dan Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare (Tahun 2004–2016). ECONOMOS*: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).

Syukri, F., Zakariah, J., Aminuddin, A., & Alamsyah, A. (2020). Analisis Sektor Unggulan Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Di Kota Parepare. ECONOMOS: *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).